UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PALEMBANG

Oleh :

NOVIYANTY

01013120040

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

2005

S
336.07
Nov
a
2005

R. 12915
Pg. 12697.

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA U.P.T. PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PALEMBANG

Oleh :

NOVIYANTY

01013120040

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

2005

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama	**:**	**Noviyanty**
NIM	**:**	**01013120040**
Jurusan	**:**	**Ekonomi Pembangunan**
Mata Kuliah	**:**	**Keuangan Daerah**
Judul Skripsi	**:**	**Analisis Potensi Penerimaan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Palembang**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Skripsi

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Syamsurijal, AK	**Drs. Harunnurasyid, M.Com**
NIP 130900942	**NIP 131844026**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PALEMBANG

Disusun oleh :
NOVIYANTY
01013120040

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Komprehensif
Pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, Juni 2005

Ketua	Anggota	Anggota
Dr. Syamsurijal, AK	Drs. Harunnurasyid, M. Com	Dr. Taufik Marwah, M.Si
130900942	131844026	132050493

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Drs. Suhel, M.Si
131993979

- Pengetahuan adalah satu-satunya kekayaan yang tidak bisa dilenyapkan. Hanya kematian yang mampu meredupkan lentera pengetahuan yang ada di dalam dirimu. Kekayaan yang sebenarnya dari suatu bangsa bukan terletak pada jumlah emas dan perak yang terkandung di dalam sumber alamnya tetapi terletak pada pengetahuan, kebijaksanaan, dan kejujuran anak-anak bangsanya.

- Memiliki sedikit pengetahuan namun dipergunakan untuk berkarya jauh lebih berarti daripada memiliki pengetahuan luas namun mati tak berfungsi.

Kudedikasikan untuk :

- *Papa dan Mama (Sebuah Cinta Yang Tak Pernah Usai)*
- *Adik-Adikku Tersayang*
- *Sohib-Sohibku, Nita Cs*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia yang diberikan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Potensi Penerimaan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan otonomi Daerah di Kota Palembang".

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan ketergantungan pemerintah Daerah pada bantuan perimbangan keuangan dari pemerintah di atasnya semakin dominan.

Pemerintah Daerah harus memiliki sumber-sumber penerimaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Untuk itu pemerintah darah dituntut untuk lebih dewasa dan mandiri dalam pengelolaan keuangan dan mencari sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan finansial daerah, sebagai wujud suksesnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan pengamatan dan penganalisaan tentang penerimaan daerah yang dominan serta bagaimanakah posisinya dalam penerimaan daerah (PAD) di Kota Palembang dan berbagai variabel yang mempengaruhi Penerimaan daerah yang menjadi andalan di Kota Palembang tersebut. Variabel tersebut adalah PDRB dan jumlah penduduk.

Penulis juga menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Inderalaya, Mei 2005

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Syamsurijal AK, selaku Dekan Fakultas Ekonomi sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I, terima kasih atas waktu dan kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Harunnurasyid, M.Com, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, terima kasih atas pengertian dan masukan-masukan yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Taufik Marwah, M.Si, selaku Dosen Penguji, terima kasih atas petunjuk dan masukan yang diberikan guna penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Suhel, M.Si dan Ibu Dra. Sa'adah Yuliana, M.Si, selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, terima kasih dan maaf atas kerepotan yang ditimbulkan oleh penulis selama ini.
5. Bapak Drs. Tarmidzi A. Rasyid, selaku dosen Pembimbing Akademik; Ibu Dra. Hj. Enny Muhaini Hanafiah, terima kasih atas nasihat dan pemberian doanya serta seluruh dosen pengajar yang telah berbagi ilmu dan pengalaman hidupnya kepada penulis.
6. Pak Tukiman, Pak Tutur, Yu' Ita, K' Indana dan seluruh karyawan FE Unsri.
7. Bapak Kepala Dipenda Kota Palembang, Bapak Kepala Dipenda seluruh Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan, Mbak-Mbak dan Mas-Mas di BPS; *matur nuwun* atas kesediaan memberikan data-data yang dibutuhkan penulis.
8. Papa dan Mama, selaku "*Lembaga IMF-koe*", takkan cukup waktuku untuk membalas segala cinta kalian tapi yang pasti "*I love u so much*".

9. Adek-adekku dan sepupu-sepupuku; Indri, Pipit, Goffar, Azis, K'aik, Lita "boncel", Ella "Burket", Odon, Alex, Virga, Uyiv, Uji, Mona dan yang lainnya; ☺ *Mo'kasih yeeeee* ☺
10. Nita, atas perannya sebagai '*pendamping setia*' penulis; De-dee atas '*suara emasnya*'; Poo atas '*siraman rohaninya*'; Lea '*sang motivator*'; Noekhe '*The Pattzi Girl*'; Ewie '*Sang Penyair Cinta*'; Anty '*teman jalan yang setia*'; Isa Trianda '*The Bodyguard From Plaju*'; Dian YS '*perancang matematis-koe*'. Hi guys....thanks a lot. Kalian telah memperingan beban dan mempercantik duniaku.
11. Mala Cs, Nilam Cs, Riki Cs, Aa Mad, Aa Hadi, Boy, Bang Yus, Gita, Syamsul, Ma'is, Rahmat, Wisman, Riris, Derma, Yudha, Tudo, Dewi Zul dan semua yang belum kesebut. Terima kasih banyak karena kalian telah membuatku begitu kaya di usia muda.

Penulis tidak akan pernah melupakan semua kebaikan yang telah diberikan selama ini, semoga Tuhan Yang maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Inderalaya, Mei 2005

Penulis

ABSTRACT

The purpose of this research are, first, to know the dominate of region revenues in Palembang City. Second, to know the position of region revenues in Palembang city. And the third is to describe any variables influence the dominate of region revenues in Palembang city. The tools of analysis be used in this research are Contribution, Location Quotient and Quadratic Regression Model.

Result of this research shows, first, in the Palembang city the dominate of region revenues are region tax and region retributions. Second, the region tax and region retributions to keep the important revenues in Palembang city. Appeared to be true with LQ>1. and the third is Bruto Regional Domestic Product and population simultaneously significant to region tax and region retributions. The elasticity was positive and significant to Bruto Regional Domestic Product and population was negative and insignificant.

Key Words : Region Revenues, Region Tax, Region Retribution, Bruto Regional Domestic Product, Population

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini, pertama, untuk mengetahui jenis-jenis peneriman daerah yang dominan di Kota Palembang. Kedua, untuk mengetahui posisi penerimaan daerah di Kota Palembang. Dan yang ketiga adalah variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan yang dominan di Kota Palembang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontribusi, Location Quotient dan regresi berganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, di Kota Palembang penerimaan yang paling dominan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, ternyata pajak daerah dan retribusi daerah memegang posisi yang penting dalam PAD Kota Palembang. ini dibuktikan dengan nilai LQ>1. Dan yang ketiga PDRB dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan besaran elastisitasnya variabel yang berpengaruh positif dan signifikan secara statistik yaitu variabel PDRB, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik.

Kata-kata kunci : Penerimaan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vii
ABSTRACT ix
ABSTRAKSI x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Penelitian 1
I. 2. Perumusan Masalah 6
I. 3. Tujuan Penelitian 6
I. 4. Manfaat Penelitian 7
I. 5. Landasan Teori 7
I. 5. 1. Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian 7
I. 5. 2. Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) 8
I. 5. 3. Teori Pertumbuhan dan Perkembangan Daerah 13
I. 5. 4. Pertumbuhan Penduduk dan Tenaga Kerja 19
I. 5. 5. Kesejahteraan Yang Hilang Karena Pajak 20
I. 6. Hipotesis 22
I. 7. Metodologi Penelitian 23
I. 7. 1. Ruang Lingkup Penelitian 23

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 050947
TANGGAL : 24 JUN 2005

I. 7. 2. Sumber Data 23
I. 7. 3. Teknik Analisis 23
I. 7. 4. Definisi Operasional Variabel 27

BAB II GAMBARAN UMUM
II. 1. Gambaran Perekonomian Kota Palembang 29
II. 1. 1. Tinjauan PDRB Kota Palembang 29
II. 1. 2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang 34
II. 1. 3. Pendapatan Per Kapita 36
II. 1. 4. Jumlah Penduduk 38
II. 2. Perkembangan PAD Kota Palembang 40
II. 2. 1. Perkembangan Pajak Daerah Kota Palembang 41
II. 2. 2. Perkembangan Retribusi Daerah Kota Palembang 43
II. 2. 3. Perkembangan Bagian Laba BUMD Kota Palembang 44
II. 2. 4. Perkembangan Penerimaan Lain-Lain Kota Palembang 45

BAB III ANALISIS DATA
III. 1. Penerimaan Daerah yang Dominan Mempengaruhi PAD Kota Palembang 47
III. 2. Potensi Penerimaan Daerah Unggulan Kota Palembang 49
III. 3. Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang 57
III. 3. 1. Hasil Estimasi 58
III. 3. 2. Uji Statistika 58
III. 3. 3. Koefisien Determinasi 62
III. 4. Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Palembang 62
III. 4. 1. Hasil Estimasi 62
III. 4. 2. Uji Statistika 63

III. 4. 3. Koefisien Determinasi 65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

IV. 1. Kesimpulan 67

IV. 2. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 1989-2003 30

Tabel 2.2. PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 1989-2003 31

Tabel 2.3. Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Per Sektor (Tanpa MIGAS) 1989-2003 33

Tabel 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 1989-2003 35

Tabel 2.5. Pendapatan Regional Per Kapita Kota Palembang Tahun 1989-2003 ... 37

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Palembang Tahun 1989-2003 39

Tabel 2.7. Perkembangan PAD Kota Palembang Tahun 1989/1990-2003 40

Tabel 2.8. Perkembangan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 1989-2003 42

Tabel 2.9. Perkembangan Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 1989-2003 .. 43

Tabel 2.10. Perkembangan Bagian Laba BUMD Kota Palembang Tahun Anggaran 1989/1990-2003 45

Tabel 2.11. Perkembangan Penerimaan Lain-Lain Kota Palembang Tahun Anggaran 1989/1990-2003 46

Tabel 3.1. Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap PAD Kota Palembang Tahun 1989/1990-2003 (%) 47

Tabel 3.2. Hasil LQ Penerimaan PAD Kota Palembang Tahun 1989/1990-2003 ... 50

Tabel 3.3. Kontribusi Jenis Pajak Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Palembang Tahun 2003 51

Tabel 3.4. Kontribusi Jenis Retribusi Terhadap Total Penerimaan Retribusi Daerah Di Kota Palembang Tahun 2003 52

Tabel 3.5. Hasil Estimasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Di Kota Palembang Periode 1989/1990-2003 58

Tabel 3.6. Angka Beban Ketergantungan Di Kota Palembang Tahun 1989-2003 .. 60

Tabel 3.7. Hasil Estimasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Retribusi Daerah Di Kota Palembang Periode 1989/1990-2003 63

BAB 1

PENDAHULUAN

1.I. Latar Belakang Penelitian

Otonomi Daerah merupakan tema lama yang tampaknya selalu menemukan aktualitas dan relevansinya. Dikatakan tema lama, karena Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan yuridis yang jelas tentang eksistensi otonomi daerah. Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, sejak itu pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam perundang-undangan sebagai penjabaran pasal 18, mulai ramai diperdebatkan. Ia menjadi prioritas di antara upaya penyusunan berbagai Undang-Undang sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tampak dari kehadiran Undang-Undang bernomor 1 tahun 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah.

Letak aktualitas dari tema lama tersebut, bahwa walaupun otonomi daerah mempunyai landasan yuridis yang kuat, tetapi pelaksanaannya senantiasa menjadi perdebatan berbagai pihak. Artinya, penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah dari masa ke masa mengandung banyak hal yang memungkinkan terjadinya perdebatan. Sampai saat ini, sudah enam kali diadakan perubahan atau penyempurnaan. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

1999 (akan disempurnakan lagi sesuai Ketetapan MPR No IV Tahun 2000), merupakan Undang-Undang ketujuh yang mengatur tentang Otonomi Daerah.[1]

Indonesia tidak menganut sistem desentralisasi dan otonomi dalam arti kebebasan penuh tetapi menganut otonomi dalam arti kebebasan terbatas. Dengan demikian otonomi daerah diartikan sebagai hak daerah dan hak masyarakat untuk memperoleh keleluasaan bergerak dan kesempatan untuk menggunakan prakarsa sendiri atas segala macam nilai dan potensi yang dikuasai untuk mengurus kepentingan publik, baik yang menyangkut pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun melalui pemberian fasilitas dan bimbingan terhadap masyarakat maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan.

Dalam UU No. 32 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah bagian dari penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dirumuskan sebagai otonomi yang nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam sistem negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat bahkan dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah adalah identik dengan pembangunan Nasional. Berdasarkan hal ini maka antara keuangan negara dan keuangan daerah terdapat hubungan yang erat.

---

[1] Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah : Desentralisasi Dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda Dan Anggota DPRD*, 2001, Jakarta, hal. 1

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong pemerintahan daerah untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungannya sendiri. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya. Kewenangan artinya keleluasaan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pusat sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pusat, keleluasaan untuk menggali sumber-sumber potensial yang ada di daerahnya, keleluasaan untuk berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan daerahnya, keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang memadai, yang didasarkan atas kriteria objektif dan adil.[2]

Dengan semakin meningkatnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka peranan keuangan daerah akan semakin penting

---

[2] Drs. Zainuddin Ismail, *Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap PAD Propinsi Sumatera Selatan*, Makalah yang disampaikan dalam Kuliah Umum FE UNSRI, 7 Oktober 2003.

karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dayanya sendiri, disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Sesuai dengan hal itu, daerah dituntut untuk meningkatkan kesiapan aparatur daerah dalam menghadapi masalah-masalah pembangunan yang lebih komplek lagi.

Salah satu ciri kemampuan suatu daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan di bidang keuangan daerah. Melalui kewenangan tersebut daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan jalan menggali sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Sumber utama penerimaan daerah terdiri dari 4 (empat) sumber, yaitu : (UU No. 35 Tahun 1999)[3]

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Dari keempat sumber penerimaan tersebut yang dapat dijadikan indikator dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah dalam APBN merupakan cermin keberhasilan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai

---

[3] *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, CV. Tamita Utama, Jakarta, 1999, hal. 74.

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari 4 sektor yaitu :[4]

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (bagian laba BUMD)
4. Penerimaan lain-lain

Bila memperbandingkan potensi penerimaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di dalam suatu wilayah, maka akan ditemui kenyataan bahwa ada daerah yang potensi penerimaannya besar dan ada pula yang potensi penerimaannya kecil. Dan hal ini wajar, karena bagi suatu negara yang mempunyai wilayah luas dengan latar belakang sejarah dan konfigurasi geografis seperti Indonesia masih dijumpai ketimpangan pembangunan antar daerah. Dalam proses pembangunan suatu daerah diperlukan adanya potensi penerimaan daerah yang dapat dijadikan andalan. Peran potensi penerimaan daerah andalan ini dalam pembangunan ekonomi sangat penting sekali karena potensi penerimaan tersebut dapat memberikan sumbangan pada peningkatan pendapatan daerah yang akan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dengan Pendapatan Asli Daerah ini maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam APBN merupakan cerminan

[4] *Ibid*

keberhasilan usaha/tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kontribusi jenis-jenis penerimaan daerah (PAD) terhadap total penerimaan PAD di Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah posisi jenis-jenis penerimaan daerah (PAD) di kota Palembang dalam penerimaan daerah (PAD) Sumatera Selatan ?
3. Bagaimanakah pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap jenis penerimaan daerah yang dominan di Kota Palembang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis penerimaan yang dominan terhadap PAD di Kota Palembang
2. Untuk mengetahui posisi jenis-jenis penerimaan daerah (PAD) di Kota Palembang di dalam penerimaan daerah (PAD) Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap jenis penerimaan daerah yang dominan di Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Bagi Dunia Keilmuan

   Bagi dunia keilmuan dapat digunakan sebagai pembanding referensi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

2. Bagi Aparatur Pemerintah

   Bagi aparatur pemerintah dapat digunakan sebagai perbandingan dan pemikiran untuk menentukan kebijaksanaan dalam menganalisis potensi penerimaan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Bagi Penulis

   Sebagai wujud penerapan ilmu-ilmu yang selama ini telah didapatkan di bangku kuliah yang digunakan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian

Dumairy (1997) menyatakan bahwa di negara manapun selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintah dalam percaturan ekonomi negerinya berperan hanya semata-mata sebagai *wasit* atau *polisi* yang hanya berfungsi membuat Undang-Undang atau peraturan, untuk kemudian

menjadi pelerai jika timbul masalah atau penyelamat jika terjadi kepanikan, termasuk di negara-negara kapitalis.[5]

Selanjutnya dalam kancah perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu :[6]

a. Peran alokatif

   Yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.

b. Peran distributive

   Yakni pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.

c. Peran stabilisatif

   Yakni pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika dalam keadaan disequilibrium.

d. Peran dinamisatif

   Yakni pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

1.5.2. Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber murni dari daerah. Untuk mempercepat tercapainya kemandirian daerah di bidang pendanaan, maka Pemerintah

---

[5] Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1997, Hal. 158.
[6] *Ibid.*

Daerah terus ditingkatkan kemampuannya agar semakin dapat mengusahakan penggalian sumber PAD-nya sendiri sesuai dengan keadaan dan potensi perekonomian yang ada di daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan dan berasal dari daerah sendiri tanpa melibatkan pemerintah pusat menurut UU No. 25 Tahun 1999 terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (bagian laba BUMD)
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pada hakekatnya pengertian pajak daerah tidak terdapat perbedaan antara pajak negara dengan pajak daerah mengenai prinsip hukumnya, misalnya mengenai subyek hukum, obyek hukum dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungutan dan pengenaan pajak.

Ciri-ciri pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang

3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkam kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan publik

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari masyarakat merupakan kewajiban masyarakat itu sendiri untuk memenuhinya. Oleh karena itu masyarakat harus mengetahui perihal retribusi baik mengenai tata cara pembayaran retribusi, hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut M. Suparmoko retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.[7]

Bagi retribusi berlaku asas pengecualian (*exlustion principle*) yaitu bagi yang tidak menikmati jasa dan atau barang-barang pemerintah dikecualikan dari pungutan tersebut. Ciri-ciri pokok retribusi yaitu :[8]

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang
2. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis

---

[7] M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*, Andi Yogyakarta, 2001, hal. 85.
[8] Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo, Persada Jakarta, 1997, hal. 152.

3. Adanya kontra prestasi (balas jasa) yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Dikenakan dalam setiap orang atau badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh negara/ pemerintah

Sedangkan mengenai pengertian retribusi daerah itu sendiri menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 disebutkan bahwa yang dimaksud retribusi daerah sebagai jasa pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Agar pemungutan retribusi daerah tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka retribusi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1957)

1. Pemungutan retribusi harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan retribusi berdasarkan undang-undang
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Sistem pemungutan retribusi harus sederhana
5. Retribusi yang dipungut harus elastis

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan kekayaan Derah Lainnya Yang Dipisahkan (Bagian Laba BUMD)

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1999 dalam penjelasannya menyebutkan bahwa perusahaan daerah adalah[9] suatu badan usaha atau perusahaan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk

[9] Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, *op. cit.*, hal. 90.

menambah hasil atau penghasilan daerah. Hasil perusahaan daerah adalah bagian dari keuntungan serta laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dibentuk pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang terdiri dari perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, misalnya Bank Pemerintah Daerah, pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan lain-lain. Sejalan dengan itu perusahaan daerah harus didasarkan atas asas-asas ekonomi perusahaan daerah atau dengan kata lain perusahaan daerah harus melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu perusahaan daerah juga bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat nasional.

Selain penerimaan dari BUMD juga ada penerimaan dari dinas-dinas pemerintah. Penerimaan ini diterima karena adanya proyek-proyek pemerintah yang diserahkan kepada dinas-dinas pemerintah. Penerimaan ini timbul karena pelayanan yang diberikan oleh dinas pemerintah kepada masyarakat. Dinas-dinas yang ditunjuk akan menjalankan proyek-proyek pemerintah dengan anggaran yang ada dan dari kegiatan proyek tersebut akan memberikan hasil yang kemudian akan menjadi penerimaan pemerintah daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sumber ini adalah hasil penerimaan daerah yang diperoleh dari penerimaan di luar pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD. Termasuk dalam kategori

penerimaan lain-lain ialah usaha yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah yang bukan perusahaan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipergunakan masyarakat, usaha daerah dalam bentuk kegiatan yang bersifat insidentil. Sumber penerimaan ini diatur dalam pasal 60 UU No. 5 tahun 1974, yang menyatakan bahwa sebagai sumber pendapatan daerah, penerimaan lain-lain diatur dengan peraturan daerah.

1.5.3. Teori Pertumbuhan dan Perkembangan daerah

A. Model Pertumbuhan Harrod-Domar[10]

Mekanisme perekonomian dengan pengertian investasi yang lebih banyak yang diarahkan kepada usaha mempercepat pertumbuhan lebih banyak diterangkan oleh Sir Roy Harrod dan Evsy Domar yang lebih dikenal dengan model pertumbuhan Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar ini yang memberikan arti penting investasi dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama investasi menciptakan pendapatan, dan kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital.

Investasi (akumulasi modal) bertujuan memperbesar output dan pendapatan di masa datang. Melalui investasi pada barang modal produktif (termasuk investasi dalam sumber daya manusia) dan investasi di bidang infrastruktur social dan ekonomi

---

[10] Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 1977 hal. 65.

untuk menunjang aktivitas perekonomian secara terpadu, peningkatan output dapat dicapai dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi menambah stok kapital (K) misalnya, pabrik-pabrik, jalan, irigasi, dan sebagainya. Jadi I = ▲K, ini berarti pula peningkatan kapasitas produksi masyarakat dan selanjutnya berarti bergesernya kurva S ke kanan seperti terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Pengaruh Investasi (Harrod-Domar)

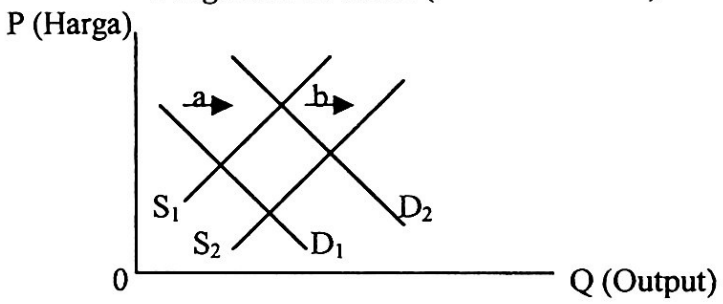

Keterangan :

a = ▲I, menggeser kurva D (permintaan barang dan jasa) lewat proses multiplier (jangka pendek)

b = ▲I, menggeser kurva S (permintaan barang dan jasa) lewat pertambahan kapasitas produksi (jangka panjang)

Harrod-Domar mengatakan bahwa setiap penambahan stok kapital masyarakat (berarti penambahan investasi) akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output (Q_p). Harrod-Domar menggambarkan hubungan yang sederhana antara ▲K, I, dan ▲Q_p sebagai berikut :

$$\triangle Q_p = h \,.\, \triangle K = hI \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

dimana h menunjukkan jumlah unit output yang bisa dihasilkan dari setiap unit kapital atau investasi. Koefisien ini disebut capital-output ratio. Jadi apabila dalam suatu tahun tertentu ada investasi sebesar I, maka stok kapital pada akhir tahun tersebut akan bertambah sebesar $\Delta K = I$. Selanjutnya penambahan kapasitas ini akan meningkatkan output (Q_p) sebesar ΔQ_p. Atau dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa pertumbuhan pendapatan nasional secara positif berhubungan dengan rasio tabungan dan sebaliknya secara negatif berhubungan dengan COR atau ICOR (Capital Output Ratio atau Incremental Capital Output Ratio).

B. Teori Ekonomi Neo Klasik[11]

Menurut teori ekonomi neo klasik seperti yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyedian faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (Full Employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal output (*Capital Output Ratio*) biasa berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa

[11] Budiono, *Teori pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1981, hal. 23.

digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan.

C. Teori Basis Ekonomi (Ekonomic Base Theory)[12]

Teori Basis Ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*Job cerations*).

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (audit) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijaksanaan mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini berdasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun secara global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangan stabilitas ekonomi.

---

[12] *Ibid.* hal. 31.

D. Location Quotients[13]

Location quotients ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperluas analisis shift share. Teknik ini membantu kita untuk menentukan ekspor perekonomian daerah dan derajat self-sufficiency suatu sektor.

Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Sektor ini dinamakan sektor basic.
2. Kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut. Jenis ini dinamakan sektor non basic atau sektor lokal.

Dasar pemikiran teknik ini adalah economic base yang intinya adalah : karena sektor basic menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor basic, tetapi juga menaikkan permintaan akan sektor non basic (lokal). Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan

---

[13] Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah*, BPFE Yogyakarta, 1999, hal. 140-142.

sehingga investasi modal dalam sektor lokal merupakan investasi yang didorong (induced) sebagai akibat dari kenaikan sektor basic.

Oleh karena itu, sector yang berpotensi yang patut dikembangkan di suatu daerah. Tugas pertama yang harus kita lakukan adalah menggolongkan setiap sektor apakah termasuk sektor basic atau non basic. Untuk keperluan ini dipakai *Location Quatient* (LQ) ; yaitu usaha mengukur kosentrasi dari suatu kegiatan (sektor) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah kabupaten itu dengan peranan kegiatan atau sektor sejenis dalam perekonomian regional atau nasional.

Kriteria penggolongan dapat bermacam-macam sesuai dengan keperluan. Misalnya dapat dilihat dari aspek kesempatan kerja, maka ukuran dasar yang dipakai adalah jumlah tenaga kerja yang diserap. Jika dilihat dari usaha menaikkan pendapatan daerah, maka ukuran dasar yang dipakai adalah besarnya kenaikan yang diciptakan di daerah. Rumus menghitung LQ adalah :

$$LQ = \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t}$$

v_i adalah value added dari suatu sektor di suatu daerah

v_t adalah value added total daerah tersebut

V_i adalah value added dari sektor sejenis secara regional/ propinsi

V_t adalah value added regional/ propinsi

1.5.4. Pertumbuhan Penduduk dan Tenaga kerja[14]

Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, secara tradisional, dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan luasnya pasar domestik. Namun demikian, patut dipertanyakan apakah cepatnya pertumbuhan penawaran tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang yang mengalami kelebihan tenaga kerja akan memberikan efek positif atau efek negatif terhadap perkembangan ekonomi. Sebenarnya, hal tersebut bergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan secara produktif memperkerjakan tambahan kerja tersebut.

Dalam studi pertumbuhan ekonomi, disamping analisis runtun waktu dengan mengamati perilaku variabel-variabel yang mempengaruhinya, juga analisis antar negara menjadi perhatian ekonom. Hal itu karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita di antara negara-negara. Dengan menggunakan analisis cross section antar negara, ternyata bahwa tingkat pertumbuhan PDB riil per kapita secara positif berhubungan dengan modal manusia awal dan secara negatif berhubungan dengan tingkat awal dari PDB riil per kapita. Negara-negara dengan modal manusia yang lebih tinggi juga mempunyai tingkat kelahiran lebih rendah dan rasio investasi fisik pada PDB yang lebih tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

---

[14] Michael P. Todaro, *Op.Cit.*, hal.114.

1.5.5. Kesejahteraan yang Hilang karena Pajak[15]

Semua cara pembiayaan pengeluaran pemerintah (termasuk pajak) pasti menimbulkan beban. Dalam beberapa hal kadang-kadang suatu pajak itu akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai pajak yang dapat dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak (welfare cost of taxation). Misalnya suatu pajak penjualan dikenakan pada penjualan mesin cuci. Pajak itu dikenakan sedemikian tinggi sehingga produksi mesin cuci menurun sampai nol. Hal ini berarti tidak ada biaya langsung dari suatu pajak sebab tidak ada penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Tetapi jelas ada beban bagi masyarakat karena pajak, yaitu tidak ada mesin cuci yang dproduksi padahal mesin cuci itu dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar di bawah ini :

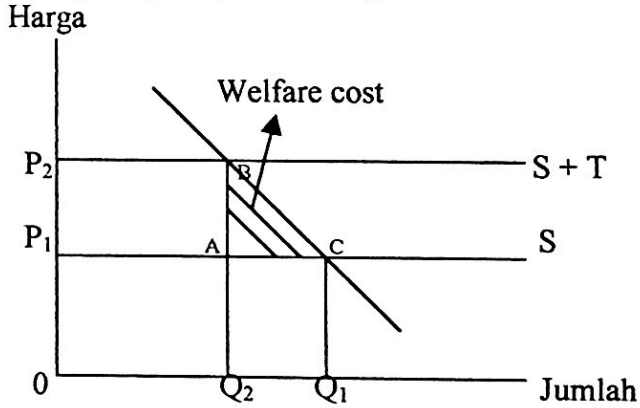

Asumsi kita ialah industri mesin cuci adalah constant cost industri. Pengurangan konsumsi mesin cuci dari Q_1 ke Q_2 berarti hilangnya manfaat sebesar BCQ_1Q_2. Sumber-sumber produktif yang dipakai untuk memproduksi Q_1Q_2 dapat

[15] M.Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik*, BPFE Yogyakarta, 1999, hal. 139.

digunakan untuk memproduksi barang-barang lain yang lebih banyak. Jadi pajak membatasi produksi barang-barang yang dikenakan pajak dan mendorong sumber-sumber produktif berpindah ke pemakaian yang lain. Tetapi nilai barang-barang lain yang diproduksi (ACQ_1Q_2) lebih sedikit dibanding dengan hilangnya nilai barang-barang yang dikenakan pajak (BCQ_1Q_2). Perbedaan atau selisih antara BCQ_1Q_2 dan ACQ_1Q_2 = BAC merupakan "welfare cost".

Dengan mengetahui tentang "welfare cost", kita dapat membandingkan pajak yang satu dengan pajak yang lain dan menentukan mana yang memberikan beban lebih besar kepada masyarakat, sehingga pemerintah dapat membuat alternatif-alternatif lain di bidang perpajakan. Demikian pula besarnya "welfare cost" dapat memberi petunjuk kepada pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya produktif seefisien mungkin.

Penelitian Terdahulu

Menurut laporan penelitian yang dilakukan oleh Fachrizal Bachri (2003) mengenai "Analisis Sektor-Sektor Unggulan Propinsi Sumatera Selatan, digunakan model analisis Location Quotient (LQ) untuk menentukan sector mana yang termasuk ke dalam sektor basis dan sektor mana yang termasuk sektor bukan basis, bahwa sejak tahun 1993 hingga tahun 2002 terdapat 3 sektor unggulan (Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran) dan 8 sub sektor (Sub Sektor Perkebunan, Sub Sektor Peternakan dan Hasil-Hasilnya, Sub Sektor Kehutanan, Sub Sektor Perikanan, Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi,

Sub Sektor Pertambangan Non Migas, Sub Sektor Penggalian, dan Sub Sektor Industri Migas).

Berdasarkan jurnal ekonomi "Respon Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Palembang" tahun 2002 oleh Taufik dan Abu Kosim di dapat bahwa respon pajak daerah terhadap PDRB bersifat inelastis, berarti pula persentase perubahan pajak daerah lebih kecil dibandingkan persentase perubahan PDRB.

Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dikemukakan dapat disederhanakan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut :

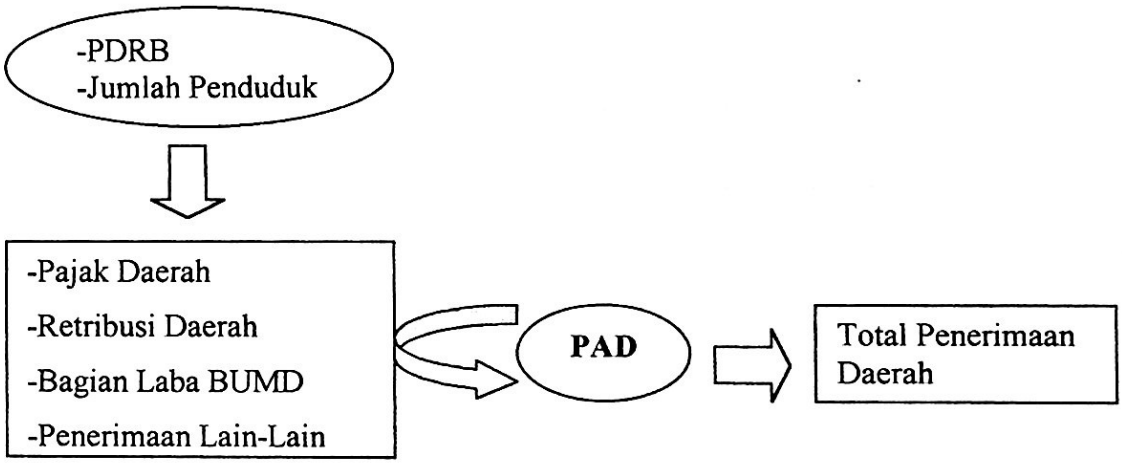

1.6. Hipotesis

Adapun hipotesisnya adalah :

1. Jenis penerimaan daerah yang dominan dalam mempengaruhi PAD di Palembang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah yang mempengaruhi PAD Kota Palembang sangat penting posisinya dalam penerimaan daerah (PAD) di Sumatera Selatan.
3. Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Palembang.

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
U P T PERPUSTAKAAN

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan potensi penerimaan daerah yang mempengaruhi PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan penerimaan lain-lain dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk bisa dikembangkan dan dijadikan andalan dalam pembangunan daerah. Untuk menganalisa hal tersebut perlu diuraikan perkembangan penerimaan PAD dari tahun 1989-2003.

I.7.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka di instansi pemerintah seperti ke kantor Biro Pusat Statistik (BPS), Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Perpustakaan Unsri. Selain itu data juga diperoleh dari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

I.7.3. Teknik Analisis

1.7.3.1. Kontribusi

Untuk menjelaskan peranan komponen PAD dalam meningkatkan penerimaan daerah di Kota Palembang digunakan analisis kuantitatif deskriptif, yaitu dengan peralatan statistik berupa rumus kontribusi, yang formulasinya sebagai berikut :[16]

$$Kontribusi = \frac{X_{ij}}{X_j} x100\%$$

Dimana : X_{ij} = Komponen PAD

X_j = PAD

1.7.3.2. Location Quotient (LQ)

Untuk mengungkap posisi penerimaan daerah dan potensinya untuk dijadikan sebagai penerimaan andalan dalam pembangunan ekonomi digunakan alat analisis "Location Quatient", yang formulasinya sebagai berikut :

$$LQ_i^r = \left[\left(V_i^r / V^r\right) / \left(V_i^n / V^n\right)\right]$$

Dimana :

LQ = Koefisien location q

i = Penerimaan daerah

r = Daerah

n = Propinsi

v = value added

---

[16] Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik*, LP3ES, Jakarta, 1986, hal. 156.

Konsep LQ menyatakan bahwa bila besaran LQ suatu penerimaan daerah lebih dari 1 (LQ>1), menandakan bahwa penerimaan daerah ini mempunyai posisi surplus yang dapat dikembangkan. Sebaliknya bila LQ<1, maka hal ini merupakan indikasi awal bahwa penerimaan daerah tersebut mempunyai posisi defisit.

1.7.3.3. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap potensi penerimaan daerah di Palembang.

Adapun model yang digunakan sebagai berikut :

$Y = f(X_1, X_2)$

Dimana :

Y = Penerimaan daerah yang dominan di Palembang

X_1 = Besarnya PDRB di Palembang

X_2 = Jumlah penduduk di Palembang

Bentuk persamaan regresi bentuk Ln-Linear dari model di atas adalah :

$$\text{Ln } Y = a + b_1 \text{ Ln PDRB} + b_2 \text{ Ln JP} + e$$

Dimana :

a = Konstanta

JP = Jumlah Penduduk Palembang

b_1, b_2 = Parameter PDRB dan jumlah penduduk Palembang

e = Error term

Sebelum regresi dilakukan, maka dilakukan pengubahan perhitungan PAD dari tahun fiscal menjadi tahun kalender. PAD menurut tahun fiscal dimulai dari tanggal 1 April sampai 31 Maret, sedangkan tahun kalender dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dikarenakan pada tahun 2000 format PAD diubah maka format PAD pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan penyesuaian guna mempermudah perhitungan.

Pertama-tama setiap tahun dihitung per triwulannya. Kemudian data triwulan keempat tahun sebelumnya ditambahkan ke tahun berikutnya (yang telah disesuaikan). Rumusnya adalah sebagai berikut :[17]

$$Y_{t1} = 1/4\left(Y_t - \frac{4,5}{12}(Y_t - Y_{t-1})\right)$$

$$Y_{t2} = 1/4\left(Y_t - \frac{1,5}{12}(Y_t - Y_{t-1})\right)$$

$$Y_{t3} = 1/4\left(Y_t + \frac{1,5}{12}(Y_t - Y_{t-1})\right)$$

$$Y_{t4} = 1/4\left(Y_t + \frac{4,5}{12}(Y_t - Y_{t-1})\right)$$

Y_t = PAD tahun t

Y_{t-1} = PAD tahun t-1

Y_{t1} = PAD triwulan pertama tahun t

Y_{t2} = PAD triwulan kedua tahun t

Y_{t3} = PAD triwulan ketiga tahun t

Y_{t4} = PAD triwulan keempat tahun t

---

[17] Insukindro, *Ekonomi Uang Dan Bank; Teori Dan Pengalaman Di Indonesia*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta,1993.

Untuk menghitung PAD penyesuaian :

$Y_t = Y_{t4-1} + Y_{t1} + Y_{t2} + Y_{t3}$

Dimana :

Y_t = PAD tahun t

Y_{t1} = PAD triwulan pertama tahun t

Y_{t2} = PAD triwulan kedua tahun t

Y_{t3} = PAD triwulan ketiga tahun t

Y_{t4-1} = PAD triwulan keempat tahun t-1

1.7.4. Definisi Operasional Variabel

Definisi-definisi utama disini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman. Definisi-definisi ini berkisar pada permasalahan yang akan dijadikan bahasan pokok analisis penulisan ini. Adapun definisi-definisi tersebut antara lain :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMN, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya di Palembang.

b. Pungutan retribusi dimaksudkan sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat bagi konsumen yang diperoleh secara langsung atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang atau izin yang diberikan pemerintah daerah Palembang.

c. Pajak daerah yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat

ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Palembang.

d. Bagian laba BUMD adalah penerimaan yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Palembang.

e. Penerimaan Lain-Lain adalah hasil penerimaan daerah yang diperoleh dari penerimaan di luar pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD. Termasuk dalam kategori penerimaan lain-lain ialah usaha yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah Palembang yang bukan perusahaan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.

f. Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di Palembang dalam periode satu tahun.

g. Jumlah penduduk adalah penduduk Kota Palembang dari tahun 1989-2003.

h. Potensi Penerimaan daerah adalah kemampuan penerimaan yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber pendapatan daerah bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Potensi penerimaan daerah ini hanya mencakup pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan lain-lain penerimaan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat statistik, 2003, *Palembang dalam Angka 2003*, Palembang

_____, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang 2003*, Palembang.

Bamim, Selamat, 2002, *Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Propinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*), Jurnal Ekonomi Pembangunan, Edisi 1, Juni 2002.

Boediono, 1981, T*eori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta.

Dumairy, 1997, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

Fachrizal, Bachri, 2003, *Analisis Sektor-Sektor Unggulan Propinsi Sumatera Selatan*, Laporan Penelitian FE Unsri.

Ismail, Zainuddin, 2003, *Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap PAD Propinsi Sumatera Selatan*, Makalah yang disampaikan pada Kuliah Umum FE Unsri.

Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo, Persada Jakarta.

Marwa, Taufik dan Syirod S., 2002, *Potensi Relatif Sektor-Sektor Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Edisi 1, Juni 2002.

Muhainy, Enny, 2002, *Kumpulan Kuliah Pengantar Ekonomi pembangunan*, Palembang.

Mulyani, 2000, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PPH) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dati II Kota Yogyakarta Tahun 1985-1998)*, Skripsi, FE Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Muzamil, 2002, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan*, Tesis PPS FE Unsri.

Sukirno, Sadono, 2001, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparmoko, M., 2001, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*, Andi Yogyakarta.

Todaro, Michael P., 1987, *Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, CV. Tamita Utama, Jakarta.

Widodo, Suseno Triyanto, 1990, *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Yudoyono, Bambang, 2001, *Otonomi Daerah : Desentralisasi Dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda Dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.